

PERAN DISTRIK DALAM PELAYANAN AKTA KELAHIRAN (STUDI KASUS DI DISTRIK SENTANI KABUPATEN JAYAPURA)

Griselda Calista Gian Fangohoy

NPP. 29.1755

Asdaf Kabupaten Jayapura Provinsi Papua

Program Studi Studi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Email: griseldafang@gmail.com

ABSTRACT

The author focuses on the problem that there are still many people who do not have birth certificates where people who have only 48% of the 7,493 certificates recorded at the Jayapura Regency Population and Civil Registry Office. **Purpose:** The purpose of this study was to determine the role of the district in birth certificate services (a case study in Sentani District, Jayapura Regency) regarding the role of the government in this case the Sentani District in Birth Certificate Services. **Methods:** This study uses a descriptive qualitative method with an inductive approach and analysis of the role theory of Soerjono Soekanto. Data collection techniques using in-depth interviews (9 informants), documentation and observation. **Results/Findings:** Birth certificate issuance services through Sentani District, Jayapura Regency still require more attention regarding poor network access. **Conclusion:** That the birth certificate service in Jayapura Regency has been implemented but has not run optimally. This is due to the inhibiting factors, namely the service does not run smoothly due to the internet network is not good, the number of apparatus that carry out birth certificate services is not sufficient, and the public does not know what prerequisites are needed for a birth certificate.

Keywords: Role, Sentani District Birth Certificate

ABSTRAK

Penulis berfokus pada permasalahan masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran dimana masyarakat yang memiliki hanya sebanyak 48% dari 7.493 akta yang terdata di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayapura. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Peran Distrik Dalam Pelayanan Akta Kelahiran (studi kasus di Distrik Sentani Kabupaten Jayapura) mengenai peran pemerintah dalam hal ini Distrik Sentani dalam Pelayanan Akta Kelahiran. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dan analisis terhadap teori Peran dari Soerjono Soekanto. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara mendalam (9 informan), dokumentasi dan observasi. **Hasil/Temuan:** Layanan penerbitan Akta Kelahiran melalui Distrik Sentani Kabupaten Jayapura masih membutuhkan perhatian yang lebih

terkait akses jaringan yang kurang bagus. **Kesimpulan:** Bahwa pelayanan akta kelahiran di Kabupaten Jayapura sudah dilaksanakan namun belum berjalan secara maksimal. Hal ini dikarenakan adanya faktor penghambat yaitu diantaranya Layanan tidak kurang berjalan lancar karena jaringan internet yang kurang bagus , jumlah aparatur yang melaksanakan layanan Akta Kelahiran belum memadai, serta masyarakat belum tau prasyarat apa saja yang dibutuhkan untuk akta kelahiran.

Kata Kunci: Peran, Akta Kelahiran Distrik Sentani

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang berdaulat yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya yang tertuang didalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke IV dengan itu maka pemerintah perlu untuk memenuhi hak setiap masyarakat dalam Administrasi Kependudukan sebagai legalitas hukum.

Kepemilikan dokumen kependudukan sangat penting untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar. Sehingga pemerintah mewajibkan seluruh masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan sebagai kegiatan penataan dan penertiban dokumen, dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dengan pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan untuk pelayanan publik. Berdasarkan data dari Dirjen Dukcapil Kemendagri bahwa kepemilikan dokumen kependudukan di Provinsi Papua masih rendah terutama akta kelahiran dimana berdasarkan data dari Dirjen Dukcapil Kemendagri tingkat kepemilikan akta kelahiran di Provinsi Papua termasuk 9 provinsi terendah di Indonesia dengan angka baru mencapai 46,99%. Sedangkan target kepemilikan akta kelahiran berdasarkan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024 menyatakan akta kelahiran di tahun 2021 harus mencapai 95%. Kabupaten Jayapura memiliki luas wilayah 17.516 dengan luas tersebut maka dibentuklah 19 distrik, dengan tujuan untuk mempermudah pelayanan publik terhadap masyarakat salah satunya kepemilikan akta kelahiran. Distrik merupakan bagian wilayah administratif provinsi papua dan papua barat yang berada dibawah Kabupaten atau Kota. Distrik menggantikan kecamatan yang biasanya digunakan di Provinsi lain di Indonesia. Distrik merupakan perangkat daerah di Papua yang memiliki wilayah kerja tertentu salah satunya penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan. Bupati Kabupaten Jayapura dalam melaksanakan tugasnya beliau melimpahkan sebagian kewenangan/urusan pemerintahan kepada Kepala Distrik untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah. Salah satunya ialah pelimpahan sebagian pelayanan dokumen kependudukan dalam hal ini yaitu akta kelahiran di Distrik untuk membantu percepatan kepemilikan Akta Kelahiran. Dari 19 distrik yang ada di Kabupaten Jayapura Dinas Dukcapil melimpahkan pelayanan secara *offline* baru 2 Distrik yaitu, Distrik Sentani dan Distrik Nimboran dari 6 distrik yang ditargetkan Disdukcapil sebagai Distrik percontohan pusat pelayanan. Itu berdasarkan Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/192 Tahun 2019, tentang Penetapan Enam Distrik Pilot Proyek.

Bupati melibatkan distrik untuk melaksanakan sebagian pelayanan dokumen kependudukan. Ia mengharapkan dengan adanya pelaksanaan pelayanan akta kelahiran melalui distrik di Kabupaten Jayapura diharapkan tingkat kepemilikan akta kelahiran dapat meningkat. Apalagi sudah dibentuk pelayanan dokumen kependudukan melalui Distrik sehingga masyarakat Kabupaten Jayapura yang

berada jauh dari lokasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura tidak perlu datang langsung ke kantor untuk mengurus tetapi dapat mengurusnya melalui Distrik setempat. Peran aktif dari Distrik sangat diperlukan dalam mengatasi permasalahan tersebut, agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat lebih optimal untuk meningkatkan pelayanan penerbitan akta kelahiran. Pada penelitian ini peneliti membahas tentang Peran Distrik dalam pelayanan akta kelahiran. Berdasarkan data kepemilikan akta kelahiran yang masih rendah.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan akta kelahiran yaitu jumlah kepemilikan dokumen akta kelahiran sebanyak 7.493 tersebut didapat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayapura Tahun 2020 dari data diatas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa jumlah kepemilikan dokumen akta kelahiran harusnya 7.493, namun berdasarkan hasil pelayanan akta kelahiran penduduk usia 0-18 tahun periode 31 desember 2020 hanya sebanyak 3.669. Berarti hanya sebanyak 48% dari 7.493 akta yang terdata di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayapura. Oleh karena itu, peran dari Distrik sangat dibutuhkan untuk membantu percepatan kepemilikan akta kelahiran. Akta kelahiran adalah salah satu dokumen yang paling dasar dan penting dimana dengan memiliki akta kelahiran seseorang dapat memenuhi kebutuhan dasar. Apabila seorang anak yang belum terdaftar maka akan mendapatkan kesulitan dikemudian hari, misalnya ketika seorang anak ingin mendaftar masuk sekolah salah satu syarat mencantumkan akta kelahiran yang merupakan kejelasan identitas seseorang. Maka jika tidak adanya kepemilikan akta kelahiran itu dapat menghambat anak tersebut untuk mendapatkan pendidikan. Salah satu contoh juga jika seseorang ingin bekerja salah satu syarat adalah memiliki KTP tetapi untuk membuat KTP salah satu dokumen dasar yang harus dimiliki yaitu akta kelahiran, maka disini dapat dilihat bahwa kepemilikan akta kelahiran sangat penting dan ini merupakan dokumen dasar yang harus dimiliki oleh setiap masyarakat Indonesia.

Melihat dari tingkat kepemilikan akta kelahiran yang masih rendah dikarenakan jarak tempuh yang jauh maka Bupati Kabupaten Jayapura mengeluarkan Peraturan Bupati No.65 Tahun 2020 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan. Peraturan bupati ini dibuat dengan tujuan agar kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Jayapura dapat memenuhi target RPJMN 2020-2024. Dengan jalur pengurusan yang dapat dilakukan melalui Distrik/Kelurahan/Kampung. Maka berdasarkan itu dibuatlah pelayanan kepemilikan dokumen kependudukan melalui Distrik salah satunya pelayanan kepemilikan akta kelahiran.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian sebelumnya, yaitu terkait dengan peran distrik dalam pelayanan akta kelahiran di Kabupaten Jayapura. Penelitian Gunawan Putra Pamungkas berjudul *Peran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Memenangi Keterlambat Pengurusan Akte Kelahiran (Studi di Kecamatan Kunder Kabupaten Karimun)*, menemukan bahwasannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum bisa memecahkan permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Karena dari hasil penelitian yang dilakukan masih ada masyarakat yang belum memahami fungsi dan manfaat dari akta kelahiran.

Penelitian berikutnya yaitu penelitian dari Marsini yang berjudul *Peran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Pelayanan*

Administrasi Kependudukan di Kota Tarakan) penelitian ini menjelaskan bahwasannya Peran Dukcapil dalam pelayanan publik di Kota Tarakan dalam penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan kegiatan administrasi kependudukan bersifat struktural dari pusat ke daerah. Penelitian berikutnya yaitu dari Ramadhana yang berjudul *Peran Kepemimpinan Kepala Dinas Dalam Pelayanan Administrasi Pembuatan E-KTP Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil* yang berkesimpulan bahwasannya Peran pemimpin sangat dibutuhkan untuk menuntut bawahannya untuk melakukan pekerjaan yang cepat dan tepat.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana objek yang diteliti oleh penulis yaitu akta kelahiran. Berbeda dari Gunawan Putra Pamungkas, Marsini dan Ramadhana. Selain itu dengan adanya pelaksanaan pelayanan akta kelahiran melalui distrik di Kabupaten Jayapura diharapkan tingkat kepemilikan akta kelahiran dapat meningkat. Apalagi sudah dibentuk pelayanan dokumen kependudukan melalui Distrik sehingga masyarakat Kabupaten Jayapura yang berada jauh dari lokasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura tidak perlu datang langsung ke kantor untuk mengurus tetapi dapat mengurusnya melalui Distrik setempat.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Distrik Dalam Pelayanan Akta Kelahiran (studi kasus di Distrik Sentani Kabupaten Jayapura) mengenai peran pemerintah dalam hal ini Distrik Sentani dalam Pelayanan Akta Kelahiran.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deksriptif kualitatif dengan pendekatan induktif dikarenakan pendekatan kualitatif mampu mendeskripsikan fenomena sosial yang diharapkan dapat menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan Peran Distrik Dalam Pelayanan Akta Kelahiran (studi kasus di Distrik Sentani Kabupaten Jayapura) ini.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 9 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, Kepala Bidang Pelayanan dan Pencatatan Sipil, Kepala Distrik Sentani, Staf Pelaksana dan Masyarakat (sebanyak 5 orang).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis Peran Distrik Dalam Pelayanan Akta Kelahiran (studi kasus di Distrik Sentani Kabupaten Jayapura) menggunakan teori dari Soerjono Soekanto. Teori tersebut memiliki 3 indikator dalam mengukur peran pelayanan yaitu kedudukan, kekuasaan dan wewenang. Adapun pembahasannya dapat dilihat dalam sub bab berikut :

3.1. Kedudukan

Kedudukan merupakan suatu posisi seseorang atau suatu kelompok sosial. Kedudukan juga memiliki arti posisi atau status seseorang yang memiliki tugas, fungsi hak dan kewajiban Teori Soerjono Soekanto (2012:210) menjelaskan bahwa seseorang yang menjalankan peran ia akan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kedudukannya. Mengacu pada teori tersebut, maka peneliti berpendapat bahwa apabila seseorang atau kelompok sosial tidak menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya disebut tidak bertanggung jawab. Kedudukan yang dijalankan ini bertujuan untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan agar suatu kebijakan dapat berjalan yang diharapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 yaitu memudahkan masyarakat dalam proses pelayanan administrasi kependudukan serta dalam memperoleh dokumen kependudukan. Dalam penelitian ini, dimensi kedudukan diwujudkan dengan adanya pelimpahan sebagian tanggung jawab oleh Bupati Kabupaten Jayapura kepada Distrik Sentani untuk melaksanakan pelayanan dokumen kependudukan di Distrik Sentani yang harusnya di laksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan dokumen kependudukan yaitu Akta Kelahiran tidak harus ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Hal ini di benarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura dengan Distrik Sentani dalam pelayanan dokumen kependudukan diharapkan dapat membantu kepemilikan dokumen kependudukan.

Distrik sentani menjalankan tugas yang telah diberikan oleh Bupati Kabupaten Jayapura salah satunya yaitu pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dalam menjalankan pemerintahan yang tergabung dalam ruang lingkup tugasnya. Salah satunya yaitu pelayanan dokumen kependudukan. peran distrik sudah berjalan dengan baik dengan penuh tanggung jawab walaupun tidak banyak tapi tetap berjalan sesuai dengan tugas yang dilimpahkan.

3.2 Kekuasaan

Kekuasaan atau *power* adalah kemampuan yang dimiliki seseorang atau kelompok atau untuk saling mempengaruhi orang lain atau kelompok lain. Kekuasaan juga akan menentukan siapa yang pantas dan seharusnya mengambil keputusan dalam suatu organisasi. Berdasarkan makna dari kekuasaan untuk saling mempengaruhi satu sama lain Kepala Distrik memiliki kekuasaan yang dia gunakan untuk mempengaruhi bawahannya untuk mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagaimana mestinya. Dalam penelitian ini, dimensi kekuasaan diwujudkan dengan Kepala Distrik menghimbau kepada seluruh RT/RW untuk menginformasikan kepada warganya masing-masing jika pembuatan akta kelahiran bisa dilaksanakan di Kantor Distrik Sentani sehingga membantu warga untuk tidak langsung datang pada kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil dan tidak perlu mengantri dengan panjang. Hal ini dihimbau langsung oleh Kepala Distrik untuk dilaksanakan sehingga masyarakat dapat mengetahui tentang hal ini. Keabsahan dalam penelitian ini yang peneliti telah amati yaitu kegiatan pelayanan dokumen kependudukan di Distrik Sentani pelimpahan ini sudah sah karena terdapat dalam Peraturan Bupati Kabupaten Jayapura Nomor 65 tahun 2020 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan jd adanya pelimpahan ini sudah sah dan dapat dijalankan didalam pemerintahan. Selanjutnya Dalam penelitian ini otoritas yang dimaksud adalah adanya hak yang diberikan oleh Bupati Kabupaten Jayapura kepada Distrik Sentani untuk menjalankan pelimpahan sebagian kewenangan untuk melakukan pelayanan dokumen

kependudukan membantu tugas dan fungsi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selain itu terdapat pengaruh dari seorang pimpinan kepada bawahannya untuk mempengaruhi masyarakat untuk dapat melakukan perintah, dalam penelitian ini pengaruh dari Kepala Distrik Sentani diperlukan untuk menginformasikan lagi kepada bawahannya yaitu kelurahan, Rt/Rw terkait pelayanan dokumen kependudukan salah satunya Akta Kelahiran yang dilakukan di Distrik Sentani, agar masyarakat yang berada di Distrik Sentani dapat mengetahui dan dapat datang ke Kantor Distrik Sentani untuk melakukan penerbitan Akta Kelahiran.

3.3 Wewenang

Wewenang berdasarkan Soerjono Soekanto (2012:210) merupakan hak yang dimiliki seseorang atau kelompok. Wewenang dalam mengambil tindakan yang perlu tugas serta tanggung jawab dapat terlaksana dengan baik. Salah satu bentuk kewenangan yang diaplikasikan dalam pelayanan akta kelahiran yaitu dilaksanakan di Distrik. Dimana dalam penugasan tugas aparatur pelaksana memiliki dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan tugas. Hal ini di amanatkan oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Kecamatan untuk bisa melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk melaksanakan tugas pembantuan. Sehingga Distrik Sentani memiliki sebagian kewenangan untuk melaksanakan pelayanan dokumen kependudukan salah satunya yaitu akta kelahiran di lingkungan kerja Distrik untuk membantu masyarakat dengan mudah mendapatkan akta kelahiran demi menunjang kehidupankedepannya.

Dalam hal wewenang terdapat beberapa indikator yang menjadi pendukung didalamnya yaitu inovasi dimana Suatu hal atau gagasan baru yang dibuat untuk memperbaharui suatu produk atau proses atau jasa adalah Inovasi. Inovasi merupakan ide, gagasan baru, yang harus digunakan dan diadopsi oleh seseorang ataupun kelompok tertentu untuk di jalankan. Inovasi dalam penelitian ini yaitu suatu ide dan gagasan yang diberikan oleh Bupati Kabupaten Jayapura kepada Distrik Sentani yaitu pelimpahan sebagian kewenangan untuk menjalankan pelayanan dokumen kependudukan di Distrik guna membantu masyarakat memperoleh dokumen kependudukan lebih mudah. Selanjutnya terdapat koordinasi yaitu Koordinasi adalah penyatuan sinkronisasi yang mengatur kegiatan kelompok untuk menciptakan suatu kesatuan tindakan yang selaras untuk mencapai tujuan bersama. Dengan adanya koordinasi yang baik dapat membantu mencegah konflik, kekacauan, agar pekerja dan pekerjaannya bisa berjalan searah untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan bersama. Hal lain yaitu pendelegasian dimana Pendelegasian berasal dari kata delegasian yaitu pelimpahan wewenang dari atasan kepada bawahannya ini dilakukan untuk mempercepat suatu pekerjaan serta agar kegiatan operasional agar berjalan sebagaimana mestinya. Pelimpahan wewenang dalam pemberian pelayanan dokumen kependudukan berupa akta kelahiran oleh Distrik Sentani berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2020 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan, dimana didalamnya berisikan perintah Bupati Kabupaten Jayapura melimpahkan sebagian urusan pelayanan kependudukan di distrik untuk memudahkan masyarakat untuk mengakses, memperoleh, dan mendapatkan dokumen kependudukan dengan mudah dan cepat.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Peran Distrik Dalam Pelayanan Akta Kelahiran (studi kasus Distrik Sentani Kabupaten Jayapura) sudah berjalan dengan baik dimana Distrik Sentani dalam posisinya di bawah

pemerintahan Bupati Kabupaten Jayapura, Distrik Sentani yang di Kepala oleh Kepala Distrik Sentani Bapak Eroll Yohanis Daisiu, SE. menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dan dilimpahkan sesuai dengan tupoksi Distrik Sentani dalam membantu pelayanan dokumen kependudukan yaitu Akta Kelahiran untuk membantu masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan dokumen kependudukan dalam penelitian ini dokumen kependudukan berupa Akta Kelahiran. Selanjutnya Kekuasaan dalam Peran Distrik Sentani dalam penelitian ini yaitu kekuasaan yang di berikan oleh Bupati Kabupaten Jayapura kepada Kepala Distrik Sentani untuk melaksanakan sebagian kewenangan kepada Distrik Sentani dalam pelayanan dokumen kependudukan yaitu Akta Kelahiran dan Wewenang dalam Peran Distrik dalam pelayanan Akta Kelahiran memiliki sebagian kewenangan untuk melaksanakan pelayanan dokumen kependudukan yaitu akta kelahiran dilingkungan kerja Distrik untuk membantu masyarakat dengan mudah mendapatkan akta kelahiran demi menunjang kehidupan kedepannya.

Peran Distrik Dalam Pelayanan Akta Kelahiran (studi kasus Distrik Sentani Kabupaten Jayapura) telah berjalan dengan cukup efektif seperti temuan Gunawan Putra Pamungkas (Gunawan Putra Pamungkas, 2017), namun penelitian ini juga masih mempunyai kekurangan yaitu Layanan penerbitan Akta Kelahiran melalui Distrik Sentani Kabupaten Jayapura masih membutuhkan perhatian yang lebih terkait akses jaringan yang kurang bagus.

Selain itu, penelitian ini berbeda dari penelitian Marsini (Marsini, 2016) dimana Peran Distrik Sentani dalam penelitian ini yaitu kekuasaan yang di berikan oleh Bupati Kabupaten Jayapura kepada Kepala Distrik Sentani untuk melaksanakan sebagian kewenangan kepada Distrik Sentani dalam pelayanan dokumen kependudukan yaitu Akta Kelahiran.

Penelitian ini juga mempunyai kekurangan lain dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yaitu jumlah aparatur yang melaksanakan layanan akta kelahiran belum memadai seperti temuan Ramadhan (Ramadhana,2020).

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan hambatan dalam Layanan penerbitan Akta Kelahiran melalui Distrik Sentani Kabupaten Jayapura masih membutuhkan perhatian yang lebih terkait akses jaringan yang kurang bagus dimana jaringan menjadi salah satu penghambat penerbitan Akta Kelahiran. Petugas menginput data untuk dikirimkan ke Dukcapil namun dikarenakan jaringan sehingga terhambat proses penerbitan akta kelahiran. Oleh karena itu pelayanan yang di berikan oleh Distrik Sentani masih belum bisa berjalan dengan lancar. Selain itu Kurangnya jumlah petugas layanan atau aparatur layanan dan atau admin mengakibatkan kurang berjalan dengan lancar proses pelayanan Akta Kelahiran di Distrik. Hal ini dikarenakan Distrik Sentani masih memiliki keterbatasan kualitas dan kuantitas pegawai. Sehingga belum mampu menyediakan sumber daya manusia yang khusus melayani layanan dokumen kependudukan. Hal tersebut dikarenakan kurangnya admin atau petugas dalam pelayanan membuat pelayanan di Distrik Sentani kurang berjalan dengan lancar. Admin atau petugas merasa kesulitan dalam memberikan pelayanan. Distrik Sentani belum mampu menyediakan sumber daya manusia untuk membantu pelayanan.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa pelayanan akta kelahiran di Kabupaten Jayapura sudah dilaksanakan namun belum berjalan secara maksimal. Hal ini dikarenakan adanya faktor penghambat

yaitu diantaranya Layanan tidak kurang berjalan lancar karena jaringan internet yang kurang bagus , jumlah aparatur yang melaksanakan layanan Akta Kelahiran belum memadai, serta masyarakat belum tau prasyarat apa saja yang dibutuhkan untuk akta kelahiran.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*): Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Layanan penerbitan Akta Kelahiran melalui Distrik Sentani Kabupaten Jayapura untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ratminto & Winarsih, Atik Septi (2008). *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik: Teori , Proses, dan Studi Kasus Pustaka Pelayanan*. Yogyakarta. Center of Academic Publishing Service (CAPS)
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar* . Jakarta : Rajawali Pers.
- Thoah, M. (2013). *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pasolong, H. (2013). *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sinambela, L. P., Rochadi, S., Ghazali , R., Muksin, A., Setiabudi, D., Bima, D., & Syaifudin. (2011). *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Moenir, H. A. (2006). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia* . Jakarta: Bumi Aksara.
- Hardiyansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Sisworoediro, Hendy S. 2008. *Mengurus Surat-Surat Kependudukan (Identitas Diri)*. Jakarta: Visimedia.
- Yuni, Tri dan Hendrastuti, Sri. 2011. *Administrasi Kependudukan Berbasis Registrasi*. Bandung: Yayasan Bina Profesi Mandiri.